

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berkeadilan, dan merata secara ekonomi dan sosial, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berkewajiban untuk melindungi seluruh rakyat, salah satu komponen utama yang mendukung pembangunan adalah tenaga kerja. Peningkatan kualitas manusia Indonesia merupakan salah satu capaian pembangunan nasional yang menentukan berhasil atau tidaknya upaya suatu bangsa untuk mencapainya. Tanpa adanya jaminan kehidupan, jelas bahwa kualitas manusia tidak dapat ditingkatkan, dan peningkatan kualitas pekerja haruslah merupakan tinggi hasil dan manfaat manusia. Strategi yang mengantisipasi risiko dan hambatan tersebut diperlukan karena pekerja sering kali menghadapi berbagai bahaya dan hambatan sosial selama proses kerja yang dapat mengganggu atau menyebabkan hilangnya kemampuan bekerja mereka, yang dapat berdampak pada kehidupan, kesejahteraan, dan keluarga mereka.

Murtanti Singar & Kristian (2023). BPJS Ketenagakerjaan merupakan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan kepada para pekerja yang pekerjaannya dapat dibahayakan melalui mekanisme asuransi. Risiko yang akan dialami pekerja biasanya dapat diminimalisir dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan sebagai asuransi. Seluruh pekerja beserta keluarganya yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan akan terlindungi dan diberikan manfaat kesejahteraan.

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) merupakan salah satu program jaminan sosial yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, program ini sangatlah penting. Apabila terjadi kecelakaan kerja, pekerja tidak dapat melanjutkan pekerjaannya karena sakit, cacat, atau meninggal dunia, yang akan mengurangi jumlah uang yang dapat mereka berikan untuk keluarga mereka (Kahin dalam Ade Syahputra, 2022).

Murtanti Hamidah et al. (2024) BPJS Ketenagakerjaan memiliki empat kategori kepesertaan yang berbeda, yaitu Peserta Upah, Bukan Peserta Upah,

Jasa Konstruksi, dan Pekerja Migran Indonesia. Pembahasan kali ini akan berfokus pada kepesertaan Bukan Peserta Upah, atau disingkat BPU. Pekerja Bukan Peserta Upah (BPU) adalah karyawan yang memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri, tidak bergantung pada pemaduan atau lembaga. Pengemudi ojek, pemilik usaha kecil, pengemudi angkutan umum, dan lain-lain merupakan contoh pekerja bukan peserta upah. Pekerja yang tidak memiliki hubungan kerja formal merupakan mayoritas peserta yang mendaftar program BPU. Karena tidak memiliki penghasilan tetap dan memiliki pengetahuan yang kurang mengenai program jaminan sosial ketrugakerjaan, kategori pekerja ini sangat rentan terhadap ketidakstabilan dalam ekonomi. Untuk mengidihkan risiko kehilangan penghasilan, program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) ini sangat penting bagi pekerja informal. Melalui pemaduan kesehatan dan bantuan keuangan. Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) memberikan perlindungan saat melakukan tugas yang berhubungan dengan pekerjaan (D. J. Siregar, 2024)

Menantu BPJS Ketrugakerjaan, dasar hukum pelaksanaan JKK di Indonesia tercantum didalam dan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kuat bagi penyelenggaraan program ini. Pertama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional mengatur bahwa setiap pekerja berhak atas jaminan sosial, termasuk jaminan kecelakaan kerja, guna melindungi mereka dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat pekerjaan. Kedua, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) memberikan mandat kepada BPJS Ketrugakerjaan untuk menyelenggarakan program jaminan sosial ketrugakerjaan, yang mencakup JKK. Dengan adanya UU ini, pelaksanaan program JKK menjadi lebih terstruktur dan terorganisir secara nasional, memastikan perlindungan dapat menjangkau seluruh tenaga kerja, termasuk pekerja formal maupun informal.

Terdapat beberapa tujuan dalam JKK bagi peserta BPU, yang dimulai dari pelaporan kecelakaan kerja, pengumpulan dokumen, hingga proses pencairan manfaat. Prosedur ini dirancang untuk memastikan bahwa peserta mendapatkan bantuan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Proses pengajuan klaim yang tertib dan terapan diharapkan dapat mengurangi kesalahan administrasi dan keterlambatan dalam proses pencairan manfaat. Agar tidak terjadi

keseluruhan mengenai langkah-langkah dan prosedur pengajuan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), proses dapat menjadi pedoman resmi bagi peserta BPU ini sendiri, untuk memahami dan mengikuti tata cara pengajuan klaim yang tepat.

Berdasarkan dari keterangan yang ada diatas mendukung penulis untuk mengangkat judul laporan yang berjudul “Tata Cara Pengajuan Klaim Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi Peserta Bukan Pemertama Upah (BPU) di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Keterselenggaraan Cabang Jambi”

1.2 Masalah Pokok Laporan

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, dapat dirumuskan masalah dalam penulisan ini, yaitu :

1. Bagaimana tata cara mengajukan klaim program Jaminan Kecelakaan Kerja bagi peserta BPU yang sedang ditangapi di BPJS Keterselenggaraan Cabang Jambi ?
2. Bagaimana tata cara pengajuan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja bagi peserta BPU yang sesuai dengan dengan SOP yang berlaku di BPJS Keterselenggaraan Cabang Jambi ?
3. Apakah tata cara pengajuan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja bagi peserta BPU yang sedang ditangapi di BPJS Keterselenggaraan di Cabang Jambi sudah sesuai dengan SOP yang berlaku ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui tata cara mengajukan klaim program Jaminan Kecelakaan Kerja bagi peserta BPU yang sedang ditangapi di BPJS Keterselenggaraan Cabang Jambi.
2. Untuk mengetahui tata cara pengajuan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja bagi peserta BPU yang sesuai dengan dengan SOP yang berlaku di BPJS Keterselenggaraan Cabang Jambi.
3. Untuk mengetahui apakah tata cara pengajuan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja bagi peserta BPU yang sedang ditangapi di BPJS

Ketenagakerjaan di Cabang Jambi sudah sesuai dengan SOP yang berlaku.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis maupun pembacanya mengenai penerapan tata cara pengajuan klaim yang dilakukan pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi, serta sebagai upaya untuk membandingkan antara teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan pelaksanaan praktik kerja lapangan sebenarnya.

2. Bagi Pemahaman

Penulis sangat mengharapkan penelitian Laporan Tugas Akhir ini, menjadi kontribusi dalam meningkatkan kinerja pemahaman. Sehingga tata cara pengajuan klaim dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.

3. Bagi Pembaca

Laporan ini juga diharapkan sebagai bahan acuan dan pembelajaran dalam penyusunan laporan magang, khususnya bagi mahasiswa di tahun-tahun berikutnya, sehingga mahasiswa memperoleh gambaran mengenai sistematisa dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Jenis Data

Dalam rangka menghimpun data yang dibutuhkan, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut :

a). Data primer

Data yang dikumpulkan langsung oleh akademisi disebut sebagai data primer. Informasi ini dikumpulkan menggunakan berbagai teknik, termasuk observasi dan wawancara. Dokumen yang diperoleh selama kegiatan magang, wawancara karyawan, atau pengamatan langsung terhadap prosedur kerja semuanya dapat menjadi data primer untuk laporan magang. Karena data ini unik dan belum pernah dipublikasi

sebenarnya, data ini dapat memberikan informasi yang dapat diandalkan dan sesuai dengan keadaan di lapangan.

ii. Data sekunder

Data yang dikumpulkan dari sumber yang sudah ada disebut sebagai data sekunder. Data ini merupakan bahwa informasi tersebut diperoleh dari buku, publikasi, artikel, internet, atau dokumen perusahaan, bukan diperoleh langsung dari lapangan. Informasi dari asip kantor, browser, atau laporan kegiatan, semuanya dapat disajikan sebagai materi dalam laporan magang. Data utama yang diperoleh secara langsung dapat dikuatkan dan ditunggalakan oleh data ini.

1.4.2 Metode Mengumpulkan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis mengumpulkan data dengan cara :

a). Metode Observasi

Melalui pengamatan langsung terhadap kejadian yang terjadi di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi, pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi. Penulis mengamati proses kerja sehari-hari. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam laporan magang, penulis juga melakukan wawancara langsung dengan staf. Dengan metode ini, penulis dapat memperoleh fakta yang dapat diandalkan untuk laporan dan memahami prosedur kerja yang sebenarnya.

ii. Metode Wawancara

Staf BPJS Ketenagakerjaan cabang Jambi diwawancarai secara langsung sebagai bagian dari proses dalam pengumpulan data melalui metode wawancara. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci dan jelas. Hasil wawancara berfungsi sebagai informasi tambahan saat membuat laporan magang.

c). Studi Pustaka

Dalam metode ini penulis melakukan dengan cara membandingkan secara tidak langsung terhadap objek yang sedang diteliti. Misalnya

dengan membaca dan mempelajari buku atau literatur yang ada hubungannya dengan objek yang diamati.

1.4.3 Metode Analisis Data

Laporan ini menggunakan metode deskriptif sebagai metode analisisnya. Metode ini berupaya menjelaskan dan menggambarkan suatu hal atau kegiatan berdasarkan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dalam hal ini, penulis berupaya menyampaikan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan selama magang di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi apa adanya, tanpa mengubah atau menambahkan informasi.

1.5 Waktu dan Lokasi Magang

1.5.1 Waktu Magang

Penulis melaksanakan kegiatan magang ini pada tanggal 13 Februari 2025 hingga tanggal 30 April 2025, dengan demikian dilaksanakan kurang lebih 2,5 bulan.

1.5.2 Lokasi Magang

Lokasi praktik dalam penyusunan laporan ini dilaksanakan di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jambi, Solok Sipin, Kec. Telangpaya, Kota Jambi, Jambi 36124.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan laporan ini, memuat beberapa bab yang membahas tentang apa saja yang ada dalam penulisan laporan ini. Agar lebih jelas dan mudah dimengerti oleh para pembaca, maka penulisan laporan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan, pada bab ini membahas mengenai latar belakang, masalah pokok laporan, tujuan dan manfaat penulisan, metode

penelitian yang terbagi menjadi 3 bagian, waktu dan lokasi ruang, serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Landasan teori, pada bab ini membahas mengenai landasan teori atau konsep yang digunakan dalam pembahasan laporan mengenai data atau masalah-masalah yang dihadapi selama ruang yang relevan dan berhubungan erat dengan judul dan pokok pembahasan laporan.

BAB III : PEMBAHASAN

Pembahasan, dalam bab ini membahas tentang data yang sesuai dengan judul laporan dan pokok pembahasan yang berisi uraian tentang gambaran umum yang berisikan sejarah singkat instansi, visi misi instansi, struktur organisasi, tugas dan fungsi di BPJS Ketenagakerjaan, serta menjelaskan tentang tata cara pengajuan klaim jaminan kecelakaan kerja bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jember.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dan saran, dalam bab ini berisi uraian kesimpulan yang ditarik dan diambil dari evaluasi di Bab III, kesimpulan ini dijelaskan dengan bahasa yang lugas dan jelas, sedangkan saran-saran yang diajukan sesuai dengan kesimpulan- kesimpulan tersebut, yang diharapkan dapat berguna untuk meningkatkan kinerja instansi.